



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

LAPORAN KINERJA

KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

2025



DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat	6
Ringkasan Eksekutif	8
 BAB I Pendahuluan	13
A. Latar Belakang	13
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	13
C. Peran Strategis Kantor Wilayah Djkn Kalimantan Barat	20
D. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 21	
E. Sistematika Laporan	22
 BAB II Perencanaan Kinerja	25
A. Penetapan Kinerja	25
B. Penganggaran	28
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	47
C. Achievement Kanwil DJKN Kalimantan Barat	48
D. Inovasi dan Keberlanjutannya	54
 BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	19
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan	19
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Uraian IKU	26
Tabel 2.2	Rincian Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025	28
Tabel 3.1	Perspektif Capaian Kinerja 2025	31
Tabel 3.2	Perbandingan Target, Realisasi IKU, Capaian dan Nilai Kinerja 2025	32
Tabel 3.3	Nilai NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2016 sampai dengan 2025	33
Tabel 3.4	Capaian IKU 1a-CP Indeks Integritas	34
Tabel 3.5	Capaian IKU 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	35
Tabel 3.6	Capaian IKU 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	35
Tabel 3.7	Capaian IKU 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	36
Tabel 3.8	Capaian IKU 2c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara	37
Tabel 3.9	Capaian IKU 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	38
Tabel 3.10	Capaian IKU 3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	38
Tabel 3.11	Capaian IKU 3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	39
Tabel 3.12	Capaian IKU 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	40
Tabel 3.13	Capaian IKU 4b-CP Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	41
Tabel 3.14	Capaian IKU 5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	42
Tabel 3.15	Capaian IKU 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	42
Tabel 3.16	Capaian IKU 5c-CP Persentase produktivitas lelang	43
Tabel 3.17	Capaian IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	44
Tabel 3.18	Capaian IKU 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa .	44
Tabel 3.19	Capaian IKU 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45
Tabel 3.20	Capaian IKU 7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	46
Tabel 3.21	Capaian IKU 7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	46
Tabel 3.22	Capaian IKU 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko ...	47
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Tahun 2025	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat	14
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat	15
Gambar 1.3	Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat	18
Gambar 1.4	Gambar Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta Para Pejabat Eselon III	18
Gambar 2.1	Ikhtisar Sasaran Strategis	26
Gambar 3.1	Penghargaan Peringkat Ke-II sebagai PPID Kategori Informatif di Lingkungan Kementerian Keuangan	48
Gambar 3.2	Penghargaan Peringkat Ke-II sebagai PPID Kategori Informatif di Lingkungan Kementerian Keuangan	48
Gambar 3.3	Penghargaan Nilai IKPA Sempurna Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak periode Semester I Tahun 2025	49
Gambar 3.4	Penghargaan Sebagai Satker Terbaik Keempat dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Digipay Semester I Tahun 2025	49
Gambar 3.5	Penghargaan Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2023 Tingkat DJKN	50
Gambar 3.6	Penghargaan Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang Tahun 2023	50
Gambar 3.7	Penghargaan Peringkat 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 2 Tahun 2023	51
Gambar 3.8	Penghargaan Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester 2 Tahun 2023	51
Gambar 3.9	Penghargaan Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2024 Tingkat DJKN	52
Gambar 3.10	Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalbar Atas kerjasama Dukungan Penilaian BMD Pemprov Kalbar Tahun 2023	52
Gambar 3.11	Penghargaan Juara III Lomba Video Reel dari Kanwil DJP Kalbar dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023	53
Gambar 3.12	Piagam Penghargaan dari BRI Regional Office Jakarta III Atas Dukungan dan kerjasama Lelang Hak Tanggungan Tahun 2024	53

SAMBUTAN

KEPALA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT



Bernadette Yuliasari Mulyatno
Kepala Kanwil DJKN Kalbar

Sambutan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Pada tahun 2025, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan global yang signifikan, salah satunya adalah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Bencana alam yang lebih sering terjadi, seperti banjir, kekeringan, dan badai, telah memengaruhi kehidupan jutaan orang dan mengancam stabilitas ekonomi global. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, harus menghadapi konsekuensi serius dari fenomena ini, termasuk dampak terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang berperan strategis, Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga turut merasakan dampak dari tantangan global ini. Pengalaman dalam menghadapi tantangan tersebut telah mengasah resiliensi organisasi, memacu adaptasi positif, serta memperkuat kemampuan dalam menghadapi situasi sulit. Melalui kemampuan adaptasi yang teruji, kami berhasil mempertahankan ketenangan, menghindari kepanikan, dan membangun keyakinan untuk terus menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak berarti semakin ringan. Pemerintah tetap dihadapkan pada dinamika global yang kompleks, termasuk ketegangan geopolitik, potensi krisis ekonomi, dan

percepatan digitalisasi. Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa isu-isu ini merupakan "game changer" yang dapat mengubah konstelasi global, sehingga perlu diantisipasi dengan cermat.

Dalam konteks tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik melalui inovasi, optimisme, dan pelayanan prima. Dengan pendekatan ini, seluruh pegawai diarahkan untuk melihat tantangan sebagai peluang dalam menciptakan layanan unggul bagi para pemangku kepentingan. Semangat kolektif dan dedikasi tinggi telah menjadi fondasi bagi kami dalam menghadirkan kinerja terbaik di setiap lini tugas.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah melahirkan berbagai inovasi strategis. Langkah-langkah percepatan SOP layanan dan publikasi aktif melalui berbagai media, termasuk TVRI, RRI, Pontianak Post, media sosial, dan situs web resmi, menjadi bagian integral dari upaya kami untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran pemerintah dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik.

Akuntabilitas dan transparansi kinerja kami diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj), yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Dalam laporan ini, dijabarkan rencana kinerja, pencapaian, serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Sepanjang tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,48%, yang merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pegawai.

Pencapaian ini mencakup 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semuanya berada dalam status hijau, sebagai refleksi keberhasilan strategi organisasi. Dalam laporan ini juga disampaikan evaluasi mendalam terhadap kendala yang dihadapi, langkah-langkah mitigasi yang diambil, serta faktor-faktor pendukung yang berkontribusi pada pencapaian target.

Di tengah perubahan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, Kanwil DJKN Kalimantan Barat

terus berupaya menjawab tantangan ini dengan inovasi, transformasi proses bisnis, dan peningkatan pelayanan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia yang lebih sejahtera.

Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mendukung pencapaian ini. Kerjasama yang telah terjalin diharapkan dapat terus diperkuat demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Akhir kata, laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kinerja organisasi. Dengan slogan SEMPURNA (Semangat, Proaktif, Tulus, Ramah, dan Amanah), kami bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan tuntas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Barat dan Indonesia secara keseluruhan.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Bernadette Yuliasari Mulyatno

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 merupakan manifestasi dari akuntabilitas dan transparansi yang secara konsisten diimplementasikan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Laporan ini menguraikan secara komprehensif rencana kinerja yang telah dirumuskan, pencapaian atas rencana tersebut, serta realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data pengukuran kinerja yang akurat, evaluasi kinerja yang terstruktur, serta analisis mendalam atas hasil-hasil tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2025 dapat diungkapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan, Peta Strategi DJKN tahun 2025 dirancang berdasarkan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Konsep ini memungkinkan penerjemahan strategi ke dalam tindakan nyata melalui penetapan tujuan strategis yang jelas. Tujuan strategis ini menjadi elemen utama yang dikembangkan lebih lanjut menjadi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang terukur.

Peta strategi Kemenkeu Two DJKN tahun 2025 mencakup empat perspektif yang saling terhubung, yaitu: perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*), perspektif proses internal (*internal process perspective*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*). Perspektif-perspektif ini dirinci menjadi 8 sasaran strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan IKU didasarkan pada prinsip SMART-C, yakni *specific* (spesifik dan unik), *measurable* (dapat diukur secara jelas), *agreeable* (disepakati oleh semua pihak terkait), *realistic* (realistis namun tetap menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (terus disempurnakan sesuai perkembangan organisasi). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal.

Pada tahun 2025, pencapaian IKU Kanwil DJKN Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang signifikan dengan seluruh 19 IKU berada dalam status hijau. Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 114,48%. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi yang sinergis dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Data pencapaian IKU secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Indeks Integritas	100	105,29
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp44,1M)	112,85 (Rp49,78M)
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset Negara	100%	102,22
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp929,4M)	118,79 (Rp1,1T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,8M) Add (2,917 M)	107,16 (Rp3,126M)
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	120
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	120
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	120
Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	110,23
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	120
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (21 BKPN)	120 (42 BKPN)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	120
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi Pegawai	80%	120
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	120
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,11
Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
8a-N	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	80	117,34

Pada tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus menghadapi dinamika global yang kompleks. Pasca transisi kepemimpinan, pemerintah kini dihadapkan pada serangkaian tantangan global baru, termasuk tensi geopolitik, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital. Kondisi ini memerlukan ketahanan dan adaptasi yang kuat untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pelayanan publik tetap optimal.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia telah menunjukkan upaya membangun resiliensi yang tangguh, dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa perubahan iklim, digitalisasi, dan tensi geopolitik merupakan faktor kunci yang akan memengaruhi konstelasi global ke depan. Oleh karena itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan tugas di Kanwil DJKN Kalimantan Barat tetap berjalan dengan optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Konsep flexible working space, sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, memungkinkan pola kerja yang fleksibel seperti *Work From Office* (WFO), *Work*

From Home (WFH), dan *Work From Homepage* (WFHb). Fleksibilitas ini mendukung produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Semangat dan integritas para pegawai tetap menjadi fondasi utama dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Inovasi yang diimplementasikan antara lain optimasi aplikasi dalam Microsoft Teams, Power BI, dan E-Area Pelayanan Terpadu. Selain itu, dilakukan pula percepatan dan integrasi layanan melalui SOP baru, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Universitas Tanjungpura, dan peningkatan publikasi yang proaktif dan solutif.

Keberhasilan Kanwil DJKN Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025 tercermin melalui berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih, antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan sebagai Satuan Kerja DJKN Dengan Kinerja Keuangan Terbaik I Tahun Anggaran 2025.
2. Penghargaan Peringkat Ke-II sebagai PPID Kategori Informatif di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Penghargaan Nilai IKPA Sempurna Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak periode Semester I Tahun 2025.
4. Penghargaan Sebagai Satker Terbaik Keempat dalam Digitalisasi

- Pengelolaan Keuangan
Menggunakan Digipay Semester I
Tahun 2025.
5. Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang Tahun 2023.
 6. Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2024 Tingkat DJKN.
 7. Penghargaan dari BRI Regional Office Jakarta III Atas Dukungan dan kerjasama Lelang Hak Tanggungan Tahun 2024.
 8. Penghargaan dari Gubernur Kalbar Atas kerjasama Dukungan Penilaian BMD Pemprov Kalbar Tahun 2023.
 9. Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2023 Tingkat DJKN.
 10. Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester 2 Tahun 2023.
 11. Peringkat 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 2 Tahun 2023.
 12. Juara III Lomba Video Reel dari Kanwil DJP Kalbar dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023

01.

Pendahuluan

Latar belakang

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Peran Strategis Kantor Wilayah Djkn Kalimantan Barat

Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sistematika Laporan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan mandat ini, DJKN diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil akhir yang dihasilkan oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas ini diwujudkan, antara lain, melalui penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja berfungsi sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2024 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki mandat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, serta lelang sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Untuk menjalankan mandat tersebut, DJKN melaksanakan berbagai fungsi strategis, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang guna memastikan pengelolaan aset negara berjalan efektif dan efisien;
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang untuk mencapai tujuan nasional di sektor ini;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai panduan operasional di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
4. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas kinerja terkait kekayaan negara, penilaian, dan lelang, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi publik;
6. Menjalankan administrasi organisasi DJKN untuk mendukung efektivitas operasional dan koordinasi internal;
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, DJKN memainkan peran sentral dalam pengelolaan aset negara yang optimal, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan kekayaan negara yang strategis dan berkelanjutan.

Gambar 1.1 Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat

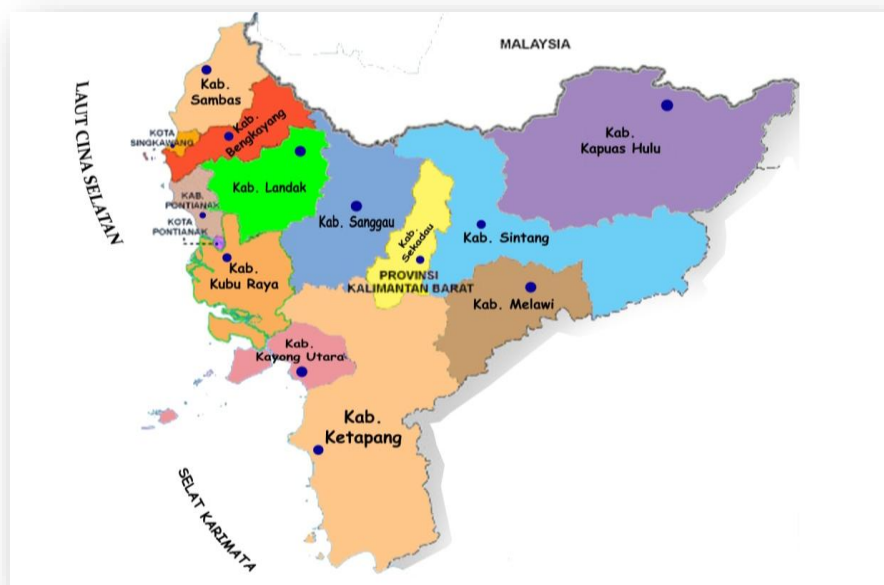


Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Barat, merupakan unit organisasi eselon II yang berfungsi sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Instansi ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 122, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengemban tugas utama berupa koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, serta pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan tugas ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari struktur organisasi, Kanwil DJKN Kalimantan Barat membawahi dua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. KPKNL Pontianak berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 19, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Sementara itu, KPKNL Singkawang terletak di Jalan Aliyang No. 1, Kota Singkawang.

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah kerja ini terbagi berdasarkan yurisdiksi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di bawah koordinasinya, yaitu:

Wilayah kerja KPKNL Pontianak:

1. Kota Pontianak
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kabupaten Ketapang
4. Kabupaten Kayong Utara
5. Kabupaten Sanggau
6. Kabupaten Sekadau
7. Kabupaten Sintang
8. Kabupaten Melawi
9. Kabupaten Kapuas Hulu

Wilayah kerja KPKNL Singkawang:

1. Kota Singkawang
2. Kabupaten Sambas
3. Kabupaten Bengkayang
4. Kabupaten Mempawah
5. Kabupaten Landak

Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah sekitar 147.557 km², memiliki sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri pengolahan sebagai pilar utama perekonomian daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu telah mendorong masyarakat menjadi lebih kritis, sekaligus meningkatkan ekspektasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

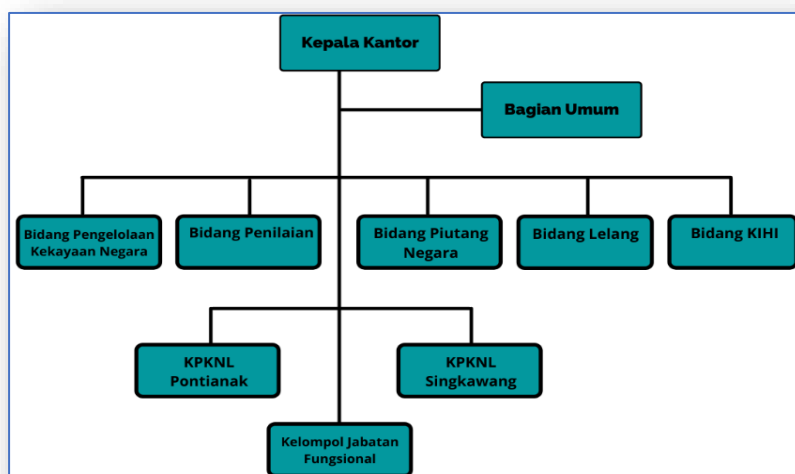
Untuk merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen dalam peningkatan mutu layanan dengan mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai unit eselon II yang bertugas mengoordinasikan, memberikan bimbingan teknis, mengendalikan, mengevaluasi, serta melaksanakan tugas-tugas di bidang kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang dalam lingkup kerja KPKNL, Kanwil DJKN Kalimantan Barat melaksanakan berbagai fungsi strategis sebagai berikut:

- a. Penyediaan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara.
- b. Supervisi, bimbingan teknis, serta evaluasi tugas-tugas di bidang penilaian aset.
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, serta evaluasi dalam pengurusan piutang negara.
- d. Penyusunan bahan pertimbangan terkait usulan penghapusan, keringanan utang, tindakan hukum paksa badan, dan penyelesaian piutang negara.
- e. Penyediaan bimbingan teknis terkait pengelolaan barang jaminan serta pemeriksaan terhadap harta atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik debitur atau penjamin.
- f. Pengembangan, evaluasi, dan verifikasi terkait pelaksanaan lelang, termasuk penggalan potensi pasar lelang.
- g. Penyediaan layanan bantuan hukum terkait kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelayanan informasi, verifikasi pengurusan piutang negara, serta pelaksanaan lelang.
- i. Pembinaan terhadap profesi penilai, usaha jasa lelang, dan pejabat lelang.
- j. Pelaksanaan dan pengawasan teknis terkait pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan kegiatan lelang.
- k. Pelaksanaan langsung tugas penilaian dan pengurusan piutang negara.
- l. Penyelenggaraan administrasi internal Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Melalui peran dan fungsi yang komprehensif ini, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berupaya mendukung efisiensi pengelolaan kekayaan negara dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) bagian umum, 5 (lima) bidang, dan kelompok jabatan fungsional. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat saat ini didukung oleh 2 (dua) kantor vertikal yaitu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang.

Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Kantor Bernadette Yuliasari Mulyatno dibantu oleh Kepala Bagian Umum Prima Indri Yana, Kepala Bidang KIH Hardi Sumaryadi, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Achmakrishna Himawan, Kepala Bidang Penilaian Prihatin, Plt. Kepala Bidang Piutang Negara Banu Hasmoro, dan Kepala Bidang Lelang Rusmawati Damarsari. Untuk KPKNL Pontianak dipimpin oleh Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko dan KPKNL Singkawang dipimpin oleh Andri Dwinanto.

Gambar 1.4 Gambar Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta Para Pejabat Eselon III



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat didukung oleh 44 Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai bidang ilmu dan keahlian seperti ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, komunikasi, teknik, administrasi, sosial, dan lainnya.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat
berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	4	15	8	27
Perempuan	-	6	7	4	17
Jumlah	-	10	22	12	44

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat
berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	1	-	1
D1	2	3	5
D3	2	3	5
D4/S1	12	7	19
S2	10	4	14
S3	-	-	0
Jumlah	27	17	44

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat/course/workshop/e-learning atau mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan strata/ tingkat pendidikan yang dimiliki. Setiap pegawai yang telah mengikuti diklat/course/workshop/e-learning juga diwajibkan untuk melakukan *knowledge sharing* kepada seluruh pegawai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi tuntutan guna memenuhi harapan masyarakat atas kualitas layanan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.

c. Peran Strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara. Adapun gambaran peran strategis tersebut adalah:

a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara, dan difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari penatausahaan aset (*asset administration*) menjadi manajer aset (*asset manager*) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat selaku Pengelola Barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.

Sebagai *asset manager* menerapkan optimalisasi aset juga terhadap gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan menyewakan ruang pada sayap kiri gedung kepada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Sutoyo.

b. Melakukan penilaian kekayaan negara

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian kekayaan negara meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, penerbitan surat berharga oleh Negara dan pengurusan Kekayaan Negara.

c. Memberikan pelayanan piutang negara

Piutang Negara adalah piutang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, pengurusan piutang negara dilaksanakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sebagai panitia interdepartemental yang diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan pengelolaan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pemerintah Daerah.

d. Memberikan pelayanan lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana penjualan sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa peraturan perundangan dan sebagai alternatif sarana transaksi penjualan aset kepada masyarakat.

Dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, lelang dicantumkan sebagai cara pelaksanaan (*execution*) putusan atau ketentuan perundangan tersebut. Lelang dipilih sebagai cara penjualan karena sifatnya yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa risalah lelang.

Peningkatan kualitas layanan, regulasi, pengawasan, penggalan potensi dan kemudahan pelaksanaannya terus menerus dilakukan dengan tujuan agar lelang menjadi sarana penjualan yang digunakan secara luas oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Untuk meningkatkan potensi penerimaan Pokok Lelang, PNBP Lelang, dan Produktivitas Lelang, Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke pihak Perbankan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Barat.

D. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara yang diperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Negara, hasil penjualan penghapusan Barang Milik Negara, Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dari setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

E. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami laporan ini, sistematika LAKIN ini kami susun dalam kerangka sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada tugas, fungsi, struktur organisasi serta peran strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 beserta addendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada subbab ini disajikan hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Renstra

Pada subbab ini diuraikan perbandingan antara IKU dan capaian Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Sasaran Strategis 2025-2029.

B. Realisasi Anggaran

B.1 Belanja Pegawai

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja pegawai.

B.2 Belanja Barang

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja barang.

B.3 Belanja Modal

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja modal.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Harapan kami, laporan kinerja ini dapat menjadi cerminan kinerja dan prestasi yang telah diraih Kanwil DJKN Kalimantan Barat sekaligus menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat pada tahun yang akan datang.

02

Perencanaan Kinerja

Penetapan Kinerja

Penganggaran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat berpedoman pada visi dan misi DJKN 2025-2029. Visi DJKN 2025-2029 adalah Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan DJKN adalah:

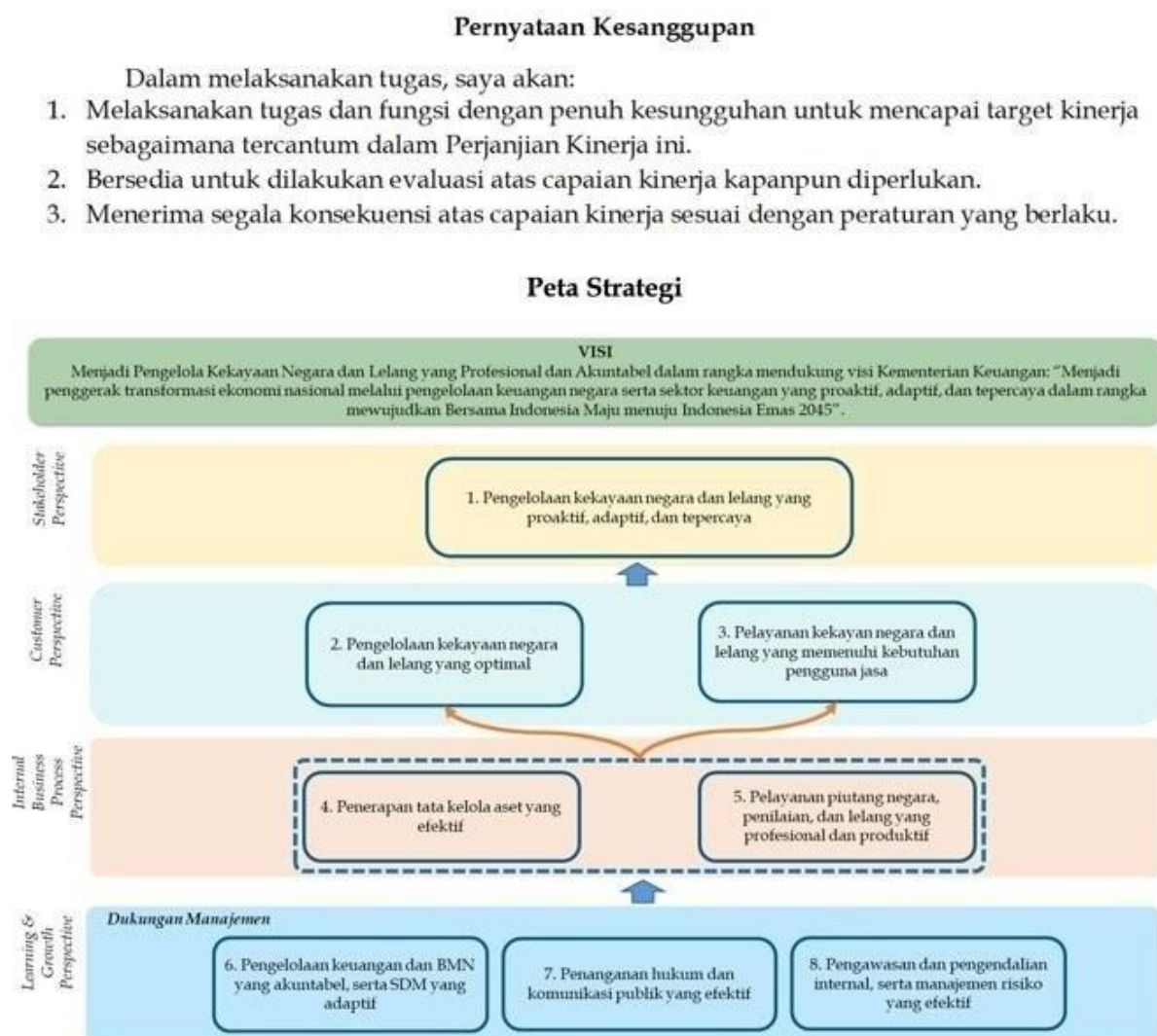
1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat finansial dan sosial
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat perlu membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada waktu satu tahun. Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen Penetapan/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2025 sesuai dengan peta strategis yang tertuang Kemenkeu Two terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun peta strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Ikhtisar Sasaran Strategis



Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU dan keterkaitannya ada pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kepala Kantor Wilayah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Uraian IKU

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya		
1a-CP	Indeks Integritas	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp44,1M)

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset Negara	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp929,4M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,8M) Add (2,917 M)
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa		
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
Penerapan tata kelola aset yang efektif		
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (21 BKPN)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2025
Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
8a-N	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	80

B. Penganggaran

Anggaran pada tahun 2025 beberapa kali mengalami revisi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penghematan. Adapun rincian anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	3.116.053.000	2.606.628.000	2.600.325.754	99,76	6.302.246
BELANJA MODAL	2.028.119.000	56.000.000	55.000.000	98,21	1.000.000
JUMLAH	5.144.172.000	2.662.628.000	2.655.325.754	99,73	7.302.246

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain:

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan;
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan non-finansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang;

4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi.

Peta Strategi Kemenkeu One DJKN Tahun 2025 menerapkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yaitu: ***stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective***. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu *specific* (menyatakan sesuatu yang khas/unik), *measurable* (dapat diukur dengan jelas), *agreeable* (disepakati), *realistic* (dapat dicapai, namun menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (dapat menyesuaikan perkembangan strategi organisasi).

03

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Achievement Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Inovasi Dan Keberlanjutannya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2025 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melaksanakan evaluasi internal melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulan dan rabu strategis sebagai upaya monitoring dan memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025 terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025, diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,48**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perspektif Capaian Kinerja 2025

NO.	PERSPEKTIF	BOBOT PERSPEKTIF (%)	BOBOT CAPAIAN (%)
1	<i>Stakeholder</i>	30	108,51
2	<i>Customer</i>	20	114,80
3	<i>Internal proses</i>	25	117,56
4	<i>Learning & Growth</i>	25	118,30
Nilai Kinerja Organisasi		100	114.48

Rincian perbandingan target dan realisasi dari 19 (sembilan belas) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi IKU, Capaian dan Nilai Kinerja 2025

No.		URAIAN IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Nilai Kinerja 2025
1	1a-CP	Indeks Integritas	100	105,29	105,51	105,51
2	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	112,85%	112,85	112,85
3	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset Negara	100%	102,22%	102,22	102,22
4	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	118,79%	118,79	118,79
5	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	107,16%	107,16	107,16
6	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,88	124,52	120
7	3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	205,85	278,17	120
8	3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	84,45	120,65	120
9	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	110,23%	110,23	110,23
10	4b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	120%	120	120
11	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	200%	200	120
12	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	120,53%	172,19	120
13	5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	103,43%	129,28	120
14	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
15	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120	120
16	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	125	120

No.		URAIAN IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Nilai Kinerja 2025
17	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,31	177,62	120
18	7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,11	115,11	115,11
19	8a-N	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	80	93,87	117,34	117,34

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah **114,48**. Nilai NKO ini mengalami penurunan dari tahun 2024 dari 116,41 menjadi 114,48 hal ini dikarena indeks integritas mengalami penurunan dan Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko dari sisi Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai yang semula 100 menjadi 98,57.

Rincian capaian dari masing-masing IKU sebagaimana data terlampir. Berikut adalah tabel data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat antara tahun 2016 sampai dengan 2025.

Tabel 3.3 Nilai NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2016 sampai dengan 2025

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKU	16	21	18	16	20	19	20	20	20	19
NKO	111,35	110,60	113,14	113,14	109,29	111,76	114,69	115,83	116,41	114,48

A.1 Analisis Capaian

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

a. IKU 1a-CP Indeks Integritas

Pada tahun ini, target yang ditetapkan untuk Indeks Integritas adalah **100**, sebuah angka yang mencerminkan standar tinggi dalam tata kelola yang baik. Namun, realisasi yang berhasil dicapai adalah **120**, melampaui target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan budaya integritas melalui berbagai program, seperti peningkatan pemahaman nilai-nilai organisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta pelibatan seluruh elemen organisasi dalam penerapan nilai-nilai integritas, telah berjalan dengan efektif.

Tabel 3.4 Capaian IKU 1a-CP Indeks Integritas

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
REALISASI	100	120	120	120	120	105,51	105,51	
CAPAIAN	100	120	120	120	120	105,51	105,51	
NILAI KINERJA	100	120	120	120	120	105,51	105,51	

b. IKU 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Tahun 2025 adalah sebesar Rp44,119,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp44,891,279,519,00 dimana capaian IKU sebesar 112,85%.

Adapun rincian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut, yaitu:

a. PNBP Aset

Target PNBP Aset tahun 2025 sebesar Rp 29.921.000.000,00 realisasi sebesar Rp35.473.223.635,00

b. PNBP Piutang Negara

Target PNBP Piutang Negara tahun 2025 sebesar Rp 25.500.000,00 realisasi sebesar Rp 35.341.894,00

c. PNBP Lelang

Target PNBP Lelang tahun 2025 sebesar Rp 14.173.000.000,00 dengan realisasi Rp14.280.511.022,00

Tabel 3.5 Capaian IKU 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max/PM
REALISASI	164,14%	95,52%	95,52%	97,83%	97,83%	112,85%	112,85%	
CAPAIAN	164,14	95,52	95,52	97,83	97,83	112,85	112,85	
NILAI KINERJA	120,00	95,52	95,52	97,83	97,83	112,85	112,85	

c. IKU 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aset negara dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, dan bernilai tambah. Target 100% merepresentasikan tingkat pencapaian optimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Namun, pada tahun ini, realisasi IKU ini mencapai 102,22%, menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan aset negara tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui ekspektasi.

Capaian 102,22% ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan transformasi pengelolaan aset negara, tetapi juga menunjukkan komitmen Kanwil DJKN Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kinerja demi mendukung pembangunan nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 3.6 Capaian IKU 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/PM
REALISASI	183,33%	112,77%	112,77%	106,40%	106,40%	102,22%	102,22%	
CAPAIAN	366,67	187,95	187,95	133,00	133,00	102,22	102,22	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	102,22	102,22	

d. IKU 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terkait pelayanan lelang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi koordinasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial. Peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial dilakukan melalui penggalan potensi lelang, koordinasi masif dengan stakeholder di tingkat regional, peningkatan pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang aktif melaksanakan lelang di wilayah Kalimantan Barat.

Tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi Pokok Lelang yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian Pokok Lelang tahun 2025 sebesar Rp1.104.108.739.510,00 dari target sebesar Rp 929.481.000.000,00 atau capaian sebesar 118,79%.

Penambahan informasi pelaksanaan lelang dengan menggunakan berbagai saluran informasi yang masif dan memiliki jangkauan yang kuat dan berpengaruh diupayakan untuk dimanfaatkan.

Tabel 3.7 Capaian IKU 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
REALISASI	164,93%	103,46%	103,46%	113,09%	113,09%	118,79%	118,79%	
CAPAIAN	164,93	103,46	103,46	113,09	113,09	118,79	118,79	
NILAI KINERJA	120,00	103,46	103,46	113,09	113,09	118,79	118,79	

e. IKU 2c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara

Tingkat penurunan outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan Piutang Negara dan penagihan yang telah dilakukan. Capaian penurunan nilai *outstanding* Piutang Negara pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh hasil sebesar Rp 3.126.336.532,00 dari target sebesar Rp.2.917.472.000,00 atau capaian sebesar 107,16%.

Keberhasilan pencapaian ini didukung dengan upaya-upaya antara lain efektifitas pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait antara lain Penyerah Piutang BKN dan lain-lain, intensifikasi penagihan dan melakukan optimalisasi pengurusan Piutang Negara, monitoring dan evaluasi yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan terhadap kinerja KPKNL.

Tabel 3.8 Capaian IKU 2c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Persentase penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
REALISASI	234,58%	110,34%	110,34%	171,19%	171,19%	107,16%	107,16%	
CAPAIAN	234,58	110,34	110,34	171,19	171,19	107,16	107,16	
NILAI KINERJA	120,00	110,34	110,34	120,00	120,00	107,16	107,16	

f. IKU 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kecepatan dan ketepatan unit kerja dalam menyelesaikan proses layanan pengguna layanan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah 77. Namun, dengan upaya yang konsisten, peningkatan sistem kerja, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi antar tim, realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil mencapai 95,88.

Tabel 3.9 Capaian IKU 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

DJKN	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	77	77	77	77	77	77	77	Max/PM
REALISASI	96,13	99,6	99,6	93,6	93,6	95,88	95,88	
CAPAIAN	125	129	129	122	122	125	124,52	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

g. IKU 3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan tingkat edukasi dan Komunikasi kepada pengguna layanan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan komitmen untuk memberikan edukasi dan Komunikasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah 74. Namun, dengan upaya yang konsisten, peningkatan sistem kerja, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi antar tim, realisasi Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan berhasil mencapai 205,85.

Tabel 3.10 Capaian IKU 3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

DJKN	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	74	74	74	74	74	74	74	Max/PM
REALISASI	243,82	316,26	316,26	235,23	235,23	205,85	205,85	
CAPAIAN	329	427	427	318	318	278	278,17	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

h. IKU 3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah

Indeks Tingkat kompetensi penilai pemerintah merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas opini nilai penilai dalam memberikan pelayanan penilaian kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah 70 realisasi Indeks Tingkat kompetensi penilai pemerintah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan berhasil mencapai 120,65.

Tabel 3.11 Capaian IKU 3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah

DJKN	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	70	70	70	70	70	70	70	Max/PM
REALISASI	120	96	96	96	96	84,45	84,45	
CAPAIAN	171	137	137	137	137	120,65	120	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

i. IKU 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pada Tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil meraih capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan sebesar 110,23%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja target sertifikasi.

Hal-hal yang mendukung capaian sertifikasi BMN antara lain:

- Peraturan Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24/PMK.06/2009 tentang Penserfikatan BMN berupa tanah dimana tindak lanjut dari Peraturan Bersama tersebut adalah kedua belah pihak membuat Berita Acara Kesepahaman Kerjasama

Percepatan Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah, masing-masing pihak baik DJKN maupun BPN mempunyai target yang harus dicapai;

- b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman satker target terhadap prosedur pensertifikatan BMN berupa tanah;
- c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan monitoring secara intensif sehingga penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan cepat;
- d. Aplikasi SIMANTAP sangat mendukung satker, Kanwil, serta KPKNL dalam meng-*update* dan memproses pensertifikatan tanah;
- e. Pihak BPN dan unit kantor layanan yang sangat responsif dan solutif terhadap permohonan sertifikasi BMN.

Tabel 3.12 Capaian IKU 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

DJKN	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/PM
REALISASI	6,73%	50,47%	50,47%	60,03%	60,03%	110,23%	110,23%	
CAPAIAN	134,59	126,18	126,18	100,04	100,04	110,23	110,23	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	100,04	100,04	110,23	110,23	

j. IKU 4b-CP Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Capaian IKU **Persentase evaluasi Kinerja** BMN (Portofolio Aset) di Tahun 2025 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU dengan indeks max. 120 sebesar 120%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras, koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Negara pada Kanwil DJKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan juga Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan satuan kerja terkait.

Tabel 3.13 Capaian IKU 4b-CP Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

DJKN	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max /PM
REALISASI	14,61%	82,03%	82,03%	93,30%	93,30%	120%	120%	
CAPAIAN	97,42	164,06	164,06	124,40	124,40	120,00	120,00	
NILAI KINERJA	97,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

k. IKU 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan piutang negara oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Capaian indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan atau menurunkan saldo BKPN sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut melibatkan serangkaian proses yang terencana dan terukur. Hal ini mencakup:

1. Pemutakhiran Data BKPN

Dilakukan secara berkala untuk memastikan validitas informasi terkait debitur, jumlah piutang, serta status penyelesaian kasus. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merancang langkah penyelesaian.

2. Pendekatan Proaktif

Tim pengelola piutang negara menerapkan pendekatan proaktif melalui komunikasi intensif dengan para debitur, pemberi pinjaman, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong penyelesaian piutang secara lebih cepat dan efisien.

3. Optimalisasi Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi manajemen piutang negara memungkinkan pemantauan real-time terhadap perkembangan saldo BKPN. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

4. Koordinasi dan Kolaborasi

Melibatkan sinergi antara DJKN, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian kasus piutang yang kompleks.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan strategi yang diterapkan berjalan efektif. Jika ditemukan kendala, langkah korektif segera dilakukan saat ini.

Tabel 3.14 Capaian IKU 5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

DJKN	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
REALISASI	170,00%	131,67%	131,67%	198,46%	198,46%	200%	200%	
CAPAIAN	170,00	131,67	131,67	198,46	198,46	200,00	200,00	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

I. IKU 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Target Tingkat kualitas layanan penilaian sebesar 70% untuk tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar 120,53%. Terlampauinya target Tingkat kualitas layanan penilaian menjadi indikasi bahwa kepuasan pelayanan kepada pihak *stakeholder* menjadi prioritas untuk Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Tabel 3.15 Capaian IKU 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

DJKN	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/PM
REALISASI	113,68%	112,50%	112,50%	151,00%	151,00%	120,53%	120,53%	
CAPAIAN	162,40	160,71	160,71	215,71	215,71	172,19	172,19	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

m. IKU 5c-CP Persentase produktivitas lelang

Target produktivitas lelang sebesar 80% untuk tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar 103,43%. Terlampauinya target produktivitas lelang menjadi indikasi dinamika perekonomian di wilayah Kalimantan Barat yang mengalami pemulihan ekonomi dampak pandemik. Jaringan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak *stakeholder* yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Focus Group Discussion (FGD) dan intensitas penyebaran informasi tentang meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pelayanan Lelang.

Tabel 3.16 Capaian IKU 5c-CP Persentase produktivitas lelang

DJKN	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/PM
REALISASI	63,38%	70,60%	70,60%	88,55%	88,55%	103,43%	103,43%	
CAPAIAN	211,27	176,50	176,50	126,50	126,50	129,28	129,28	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

n. IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Indeks Kualitas Kinerja Anggaran merupakan salah satu IKU yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, yang mencerminkan pencapaian sempurna dari rencana dan alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan awal.

Namun, pada realisasi tahun ini, Indeks Kinerja Anggaran mencapai 120%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi target awal, tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan.

Tabel 3.17 Capaian IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

DJKN	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
REALISASI	120	120	120	120	120	120	120	
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

o. IKU 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu IKU yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, yang mencerminkan pencapaian sempurna dari rencana dan alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan awal.

Namun, pada realisasi tahun ini, Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa mencapai 120%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa tidak hanya memenuhi target awal, tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan.

Tabel 3.18 Capaian IKU 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

DJKN	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
REALISASI	120	120	120	120	120	120	120	
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

p. IKU 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Definisi IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Tujuan adanya IKU ini adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan penyelenggara.

Pada tahun 2025, persentase pengembangan pegawai mencapai 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Hal yang mendukung pencapaian target ini antara lain banyaknya pelaksanaan diklat yang ditawarkan oleh Kantor Pusat DJKN dan adanya aplikasi diklat yang memudahkan pegawai dalam menentukan diklat yang akan diikutinya.

Tabel 3.19 Capaian IKU 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/PM
REALISASI	64,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	322,22	250,00	250,00	166,67	166,67	125,00	125,00	
NILAI KINERJA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

q. IKU 9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah IKU yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas berbagai aktivitas komunikasi dan kehumasan dalam mendukung tujuan organisasi. Indeks ini mencakup penilaian terhadap strategi komunikasi, pelaksanaan program kehumasan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah 3,55. Angka ini merepresentasikan standar pencapaian yang dianggap cukup baik dalam mendukung ekosistem komunikasi yang efisien dan strategis. Namun, realisasi yang dicapai mencapai 6,31 jauh melampaui target yang ditentukan.

Tabel 3.20 Capaian IKU 7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

DJKN	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/PM
REALISASI	5,23	9,53	9,53	6,66	6,66	6,31	6,31	
CAPAIAN	147	268	268	188	188	178	177,62	
NILAI KINERJA	120	120	120	120	120	120	120	

r. IKU 7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum adalah IKU yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas berbagai aktivitas penanganan permasalahan hukum. Indeks ini mencakup penilaian terhadap penanganan masalah hukum yang telah masuk di pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Maupun di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk Indeks penanganan permasalahan hukum adalah 100. Angka ini merepresentasikan standar pencapaian yang dianggap cukup baik dalam penanganan masalah hukum di Kantor Wilayah DJKN kalimantan Barat. Realisasi Indeks penanganan permasalahan hukum yang dicapai Kantor Wilayah DJKN kalimantan Barat mencapai 115,11 jauh melampaui target yang ditentukan.

Tabel 3.21 Capaian IKU 7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum

DJKN	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	Max/PM
REALISASI	116,39	116,61	116,61	116,10	116,10	115,11	115,11	
CAPAIAN	116	117	117	116	116	115	115,11	
NILAI KINERJA	116,39	116,61	116,61	116,10	116,10	115,11	115,11	

s. IKU 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU "Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko" bertujuan untuk mengukur seberapa baik organisasi mampu mengelola kinerja dan risiko secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan target awal yang ditetapkan sebesar **80**, hasil realisasi mencapai **93,87**, melampaui target dengan capaian **117,34%**.

Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan komitmen Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam mewujudkan tata kelola yang unggul dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Ke depan, keberhasilan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan risiko, guna mencapai visi jangka panjang organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 3.22 Capaian IKU 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

DJKN	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
TARGET	80	80	80	80	80	80	80	Max/PM
REALISASI	96,95	91,56	91,56	92,28	92,28	93,87	93,87	
CAPAIAN	121	114	114	115	115	117	117,34	
NILAI KINERJA	120	114,45	114,45	115,36	115,36	117,34	117,34	

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran belanja Kanwil DJKN Kalimantan Barat mencapai **99,73%**. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa mengelola anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja TA 2025 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	3.116.053.000	2.606.628.000	2.600.325.754	99,76	6.302.246
BELANJA MODAL	2.028.119.000	56.000.000	55.000.000	98,21	1.000.000
JUMLAH	5.144.172.000	2.662.628.000	2.655.325.754	99,73	7.302.246

C. Achievement Kanwil DJKN Kalimantan Barat

C.1 Penghargaan sebagai Satuan Kerja DJKN Dengan Kinerja Keuangan Terbaik I Tahun Anggaran 2025

Gambar 3.1 Penghargaan sebagai Satuan Kerja DJKN Dengan Kinerja Keuangan Terbaik I Tahun Anggaran 2025



C.2 Penghargaan Peringkat Ke-II sebagai PPID Kategori Informatif di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambar 3.2 Penghargaan Peringkat Ke-II sebagai PPID Kategori Informatif di Lingkungan Kementerian Keuangan



C.3 Penghargaan Nilai IKPA Sempurna Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak periode Semester I Tahun 2025.

Gambar 3.3 Penghargaan Nilai IKPA Sempurna Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak periode Semester I Tahun 2025



C.4 Penghargaan Sebagai Satker Terbaik Keempat dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Digipay Semester I Tahun 2025.

Gambar 3.4 Penghargaan Sebagai Satker Terbaik Keempat dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Digipay Semester I Tahun 2025



C.5 Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2023 Tingkat DJKN

Gambar 3.5 Penghargaan Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2023 Tingkat DJKN



C.6 Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang Tahun 2023

Gambar 3.6 Penghargaan Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang Tahun 2023



C.7 Peringkat 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 2 Tahun 2023

Gambar 3.7 Penghargaan Peringkat 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 2 Tahun 2023



C.8 Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester 2 Tahun 2023

Gambar 3.8 Penghargaan Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester 2 Tahun 2023



C.9 Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2024 Tingkat DJKN

Gambar 3.9 Penghargaan Peringkat 3 NKO Semester 1 tahun 2024 Tingkat DJKN



C.10. Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalbar Atas kerjasama Dukungan Penilaian BMD Pemprov Kalbar Tahun 2023

Gambar 3.10 Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalbar Atas kerjasama Dukungan Penilaian BMD Pemprov Kalbar Tahun 2023



C.11 Juara III Lomba Video Reel dari Kanwil DJP Kalbar dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023

Gambar 3.11 Penghargaan Juara III Lomba Video Reel dari Kanwil DJP Kalbar dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023



C.12 Piagam Penghargaan dari BRI Regional Office Jakarta III Atas Dukungan dan kerjasama Lelang Hak Tanggungan Tahun 2024

Gambar 3. 12 Piagam Penghargaan dari BRI Regional Office Jakarta III Atas Dukungan dan kerjasama Lelang Hak Tanggungan Tahun 2024



D. Inovasi Dan Keberlanjutannya

D.1 Inovasi Program Agen Perubahan

Agen Perubahan hadir sebagai motor penggerak transformasi organisasi, membangun budaya kerja yang unggul, dan mendorong setiap individu untuk menjadi pelaku perubahan.

Melalui program ini, Kanwil DJKN Kalimantan Barat menunjuk individu-individu inspiratif yang siap menjadi contoh teladan dalam etika kerja, profesionalisme, dan inovasi. Para agen perubahan ini tidak hanya membawa gagasan, tetapi juga aksi nyata yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang efektif dan efisien.

D.2 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Salah satu inovasi kami adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor, yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, produktif, dan modern.

Melalui pembaruan fasilitas kerja, optimalisasi ruang pelayanan, dan integrasi teknologi terkini, kami memastikan bahwa setiap pegawai dan masyarakat yang berinteraksi dengan Kanwil DJKN mendapatkan pengalaman yang lebih baik.

D.3 Publikasi

Publikasi senantiasa dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat melalui media sosial, website, media massa lokal Pontianak Post, acara Bincang di TVRI Stasiun Kalimantan Barat, RRI dan aktif menyampaikan opini yang diterbitkan melalui website DJKN dan harian Pontianak Post.

D.4 Buku Profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Disusunnya buku profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat ditujukan untuk menjadi panduan bagi *stakeholders* agar lebih mengenal Kanwil DJKN Kalimantan Barat baik mengenai layanan yang diberikan serta jangka waktu penyelesaian sesuai SOP, tugas dan fungsinya, struktur organisasi, wilayah kerja, dan pejabat dan pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

04.

Penutup



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil Wilayah DJKN Kalimantan Barat serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2025-2029.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat/*tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun 2025 telah ditetapkan 8 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2025 yang juga merupakan turunan dari IKU Kemenkeu *One*.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang menghadapi tantangan di tahun 2025 dan hasil kinerja tahun 2025 tercermin dalam capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat tahun 2025 sebesar 114,48%.

Kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif di tengah ketidakpastian global, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Namun demikian, seluruh insan pegawai Kanwil DJKN Kalimantan senantiasa berusaha menjadikan setiap kendala atau tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat pada tahun 2025 secara umum dapat dikatakan sangat baik dan dari target 19 IKU semuanya berhasil hijau.



Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait atas capaian kinerja dan strategi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, sehingga dapat berguna dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja ini harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dapat meningkatkan kinerjanya dan semakin dirasakan perannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

LAMPIRAN





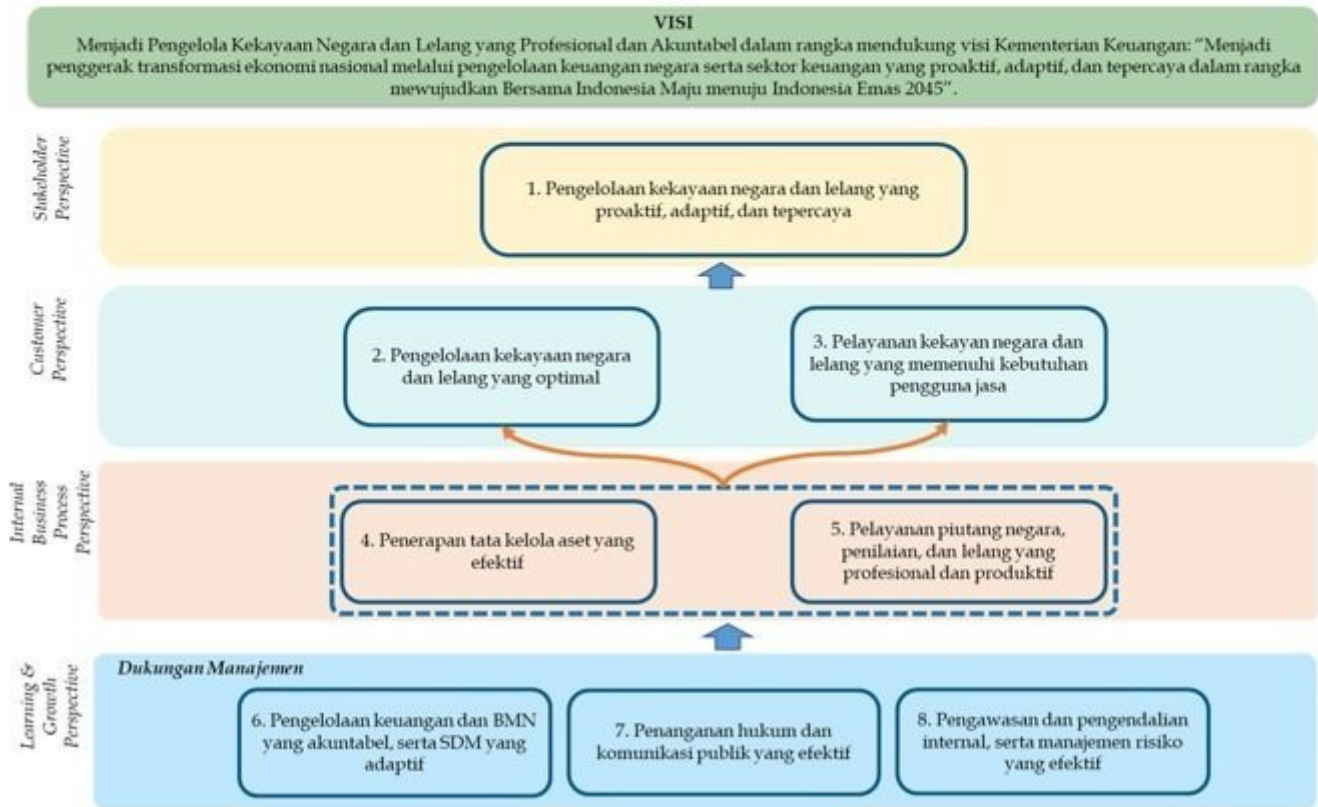
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-20/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
- 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp44,1M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp929,4M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,8M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (21 BKPN)
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp791,953,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp78,339,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp172,188,000
3. Pengelolaan Aset	Rp533,616,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp7,810,000
Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp4,352,219,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp30,320,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp4,268,403,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp38,096,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp115,400,000

Kota Pontianak, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp44,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp929,4 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (1,8M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (21 BKPN)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Pontianak, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Pontianak, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Tetik Fajar Ruwandari		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19760822 199503 2 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp44,1M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp929,4M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,8M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (21 BKPN)	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Kota Pontianak, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	91 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp44,1M)
	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp929,4 M)
	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (1,8M)
	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (21 BKPN)
	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								



Kota Pontianak, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 20A/KN/2025

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-20/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (1,8 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (2,917 M)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

[illegible]

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Pontianak, 11 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Bernadette Yuliasari Mulyatno



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat tanggal 11 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (1,8 M)	Penerima Layanan
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (2,917 M)	Penerima Layanan

Pontianak, 11 Desember 2025

Pejabat penilai kinerja,

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Bernadette Yuliasari Mulyatno



